

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi dapat dikatakan aspek yang cukup penting dalam pelaksanaan demokrasi. Hak ikut serta yang dimiliki oleh warga masyarakat dapat menentukan isi dari sebuah keputusan yang dibuat melalui mekanisme hukum dan politik serta dilaksanakan oleh pemerintah yang dapat memengaruhi khalayak umum. Sebab demikian, partisipasi politik bisa dikatakan sebagai keikutsertaan khalayak umum untuk menentukan keputusan politik yang menyangkut dan atau memengaruhi kehidupannya (Surbakti, 2013).

Partisipasi politik dapat dilaksanakan oleh warga negara secara langsung maupun perwakilan. Partisipasi politik dapat dalam definisi yang umum dikatakan sebagai kegiatan individu atau kelompok untuk aktif ikut serta dalam kehidupan politik, di antara lain dengan mengikuti pemilihan pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak ikut serta memengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah (Budiardjo, 2008).

Mengenai aktifitas individu untuk memengaruhi keputusan atau kebijakan pemegang kekuasaan, ada yang dilandasi dari kesadaran pribadi, dan juga ada yang dilakukan berdasarkan desakan dan bahkan manipulasi dari pihak lain (Surbakti, 2013). Definisi yang dimaksud atas partisipasi politik disini ialah sebuah aktifitas yang dilakukan oleh seseorang sebagai warga negara, bukannya sebagai praktisi politik ataupun PNS. Partisipasi politik yang dimaksud disini memiliki sifat sukarela, bukan dimanipulasi atau diarahkan oleh penguasa maupun organisasi

politik (Anggara, 2013). Dalam kenyataan kedua bentuk dari partisipasi politik ini sulit dibedakan, oleh karena itu dalam kegiatan yang bersifat kesadaran diri ataupun pengarahan termasuk dalam partisipasi politik.

Partisipasi politik dapat dikategorikan berdasarkan banyak pelakunya, yakni individu dan kelompok. Dengan maksud apabila ada seseorang yang menyuarakan pendapatnya dalam bentuk tulisan berisi kritik maupun keluhan kepada penguasa itu bisa disebut partisipasi secara individu. Sedangkan partisipasi secara kelompok ialah kegiatan kolektif khalayak umum secara bersamaan untuk memengaruhi pemerintahan seperti halnya kegiatan pemilihan umum (Surbakti, 2013). Penelitian ini akan berfokus pada pemilihan umum khususnya *electoral activity* sebagai salah satu bentuk partisipasi politik.

Dengan diadakannya pemilihan umum, akan erat hubungannya dengan partisipasi politik masyarakat. Angka penggunaan hak pilih yang tinggi, bisa dikatakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kualitas dan juga bobot suatu negara dalam berdemokrasi. Penelitian ini akan membahas sejauh mana minat khalayak umum dalam menggunakan hak pilihnya di dalam pemilihan umum. Tingkat partisipasi akan berbanding lurus dengan tingkat *legitime*-nya hasil pemilihan umum. Jika masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya, maka akan ada istilah golpu (golongan putih). Selanjutnya akan dipaparkan grafik persentase golput dalam beberapa pemilihan umum.

Tabel 1. 1

Tabel Penggunaan Hak Suara pada Pemilihan Presiden 2004 - 2009

No	Tahun	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Suara	Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Suara	Rasio Pemilih yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan Hak Suara
1	2004	153.357.307	117.625.054	35.732.253	76,70 : 23,30
2	2009	171.265.442	124.253.077	47.012.364	72,55 : 27,45
3	2014	190.307.134	132.358.612	57.948.522	69,58 : 30,42
4	2019	190.770.329	154.066.118	36.704.211	80,76 : 19,24

Berdasarkan perhitungan LSI (Lembaga Survei Indonesia) dengan menggunakan 100% sampel, data pada Pilpres 2019 hak pilih yang tidak digunakan mencapai 19,24%. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), data hak pilih yang tidak digunakan pada Pilpres 2004 sejumlah 23,30%, pada Pilpres 2009 mencapai 27,45%, dan pada Pilpres 2014 mencapai 30,42%. (Khairunisa, 2019 ; Safitri, 2019 ; Hutabarat, 2019). Meskipun penggunaan hak pilih pada Pilpres dari tahun 2004 hingga 2014 terus menurun, akan tetapi penggunaan hak pilih pada tahun 2019 mengalami peningkatan (Safitri, 2019).

Tabel 1. 2

Tabel Penggunaan Hak Suara pada Pemilihan Walikota Kota Tangerang

2004 - 2018

No	Tahun	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Suara	Jumlah Pemilih yang Tidak Menggunakan Hak Suara	Rasio Pemilih yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan Hak Suara
1	2008	972.207	699.989	272.218	72,00 : 28,00
2	2013	1.161.855	660.050	501.805	56,81 : 43,19
3	2018	1.027.522	688.748	338.774	67,03 : 32,97

Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya 28,00% pada Pilwakot 2008 (Permana, 2014), 43,19% pada 2013 (KPU, 2013), dan 32,97% pada 2018 (Sepatani, 2018). Data hak pilih yang tidak digunakan dalam Pilwakot Kota Tangerang di tiga periode terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa masih adanya inkonsistensi penggunaan hak suara oleh masyarakat. Disadari atau tidak secara langsung maupun tidak langsung seluruh anggota masyarakat mengalami proses sosialisasi politik.

Didalam daftar pemilih tetap pemilih muda (usia 17 – 35) ada dalam persentase 35 – 40% (Defianti dkk.,2018). Pemilih pemula kini menjadi sasaran para praktisi politik yang ingin meraup suara guna menjadi anggota dewan. Hal ini dikarenakan kondisi idealis pemilih pemuda yang dapat dipengaruhi (Hidayat, 2018). Perlunya sosialisasi dan pendidikan politik yang cukup agar pemilih muda khususnya pemilih

pemula agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam menggunakan hak suaranya. Sekolah bisa jadi salah satu stimulus agar pemilih pemula agar dalam pemilihan bisa aktif berpartisipasi.

Menurut Joniarto Parung dalam Rizki (2019) lembaga pendidikan dapat mengupayakan pengurangan angka golput di kalangan muda adalah dengan cara edukasi dan sosialisasi mengenai betapa penting penggunaan hak pilih dalam Pemilu. Prof. Joniarto Parung juga menyatakan kalangan muda dalam pentingnya keterlibatan saat Pemilu untuk mengkritisi apakah program pemerintah berpihak di berbagai bidang khususnya pendidikan. Selain sosialisasi dan edukasi mengenai politik, sekolah juga dapat menstimulus *awareness* para siswa mengenai partisipasi politik melalui sebuah kegiatan yang disebut pemilihan osis.

SMA Islam Asysyakirin dalam satu tahun terakhir menentukan ketua osisnya menggunakan metode sistem pemungutan suara berbasis *online* (e-voting). SMA Islam Asysasyakirin mengadopsi sistem ini dari SMK Global Mandiri yang telah menerapkan sistem ini selama 4 tahun kebelakang dan terbukti dapat meningkatkan partisipasi dalam pemilihan ketua Osis disana. Teknisnya di hari pemilihan seluruh siswa diarahkan untuk berkumpul di tempat yang telah ditentukan, selanjutnya panitia (pemilihan ketua osis) menyediakan bilik suara yang dilengkapi sebuah laptop didalamnya. Secara bergantian siswa menggunakan hak suaranya sesaat setelah nama mereka dipanggil satu persatu. Data awal yang peneliti terima ialah 80% hak pilih yang digunakan siswa dalam pemilihan ketua Osis ini. Jika merujuk pada Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Pasangan calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia”.

Maka pemilihan ketua Osis di SMA Islam Asysyakirin tergolong tinggi, karena memperoleh 80% dari seluruh siswa. Akan tetapi jika melihat dari teknis pelaksanaan Pesta Demokrasi dalam pemilihan ketua osis pada SMA Islam Asysyakirin. Partisipasi yang muncul dari pelaksanaan Pesta Demokrasi adalah partisipasi dalam bentuk *mobilized participation* yang dimana para siswa digerakan oleh sekolah untuk memilih dan bukan dalam bentuk *autonomus* yang dimana siswa memilih karena kesadaran diri sendiri bahwa ia memiliki hak pilih. Penelitian ini akan memuat upaya sekolah dalam meningkatkan sikap partisipasi politik.

B. Masalah Penelitian

Masalah penelitian dalam penelitian ini ialah bagaimana cara untuk meningkatkan sikap partisipasi politik dalam pesta demokrasi pada pemilihan ketua OSIS di SMA Islam Asysyakirin?

C. Fokus dan Subfokus

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui upaya sekolah dalam meningkatkan partisipasi politik siswa dalam Pesta Demokrasi pada pemilihan ketua OSIS. Peneliti memfokuskan pada kesadaran siswa dalam penggunaan hak pilih pada saat pemilihan ketua OSIS berlangsung. Subfokus penelitian terletak pada rangkaian aktivitas, metode, serta berbagai faktor yang dapat mendukung dan menghambat pada

pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di SMA Islam Asysyakirin, khususnya dalam meningkatkan partisipasi politik siswa.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana upaya sekolah dalam meningkatkan partisipasi politik siswa pada pesta demokrasi dalam pemilihan ketua OSIS?
2. Bagaimanakah upaya kurikulum sekolah dalam meningkatkan partisipasi politik siswa?
3. Bagaimanakah upaya masyarakat sekolah dalam meningkatkan partisipasi politik siswa?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selain itu penelitian ini juga peneliti harapkan dapat memberikan data yang valid sehingga kelak penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi penelitian selanjutnya, yang dimana penulisan ilmiah itu berkenaan dengan topik bahasan pesta demokrasi, pemilihan ketua osis dan partisipasi politik.

2. Manfaat Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan atau saran bagi sekolah yang menjadi tempat penelitian agar lebih memperhatikan implementasi demokrasi pada pemilihan ketua osis agar benar menjadi sebuah media mempelajari apa itu partisipasi politik. Dengan harapan siswa/i di sekolah yang bersangkutan memiliki kesadaran atas hak pilihnya serta menggunakannya dengan bijak. Sehingga kedepannya akan meningkatlah jumlah penggunaan hak suara apabila diadakannya pemilu baik tingkat kota, provinsi maupun nasional.